



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

BUKU I

RINGKASAN EKSEKUTIF

C I M A H I



DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAH I TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2017-2022, Kota Cimahi memiliki misi yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka Kota Cimahi membuat dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD).

Pembuatan DIKPLHD ini juga didasari dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada peraturan tersebut juga menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.

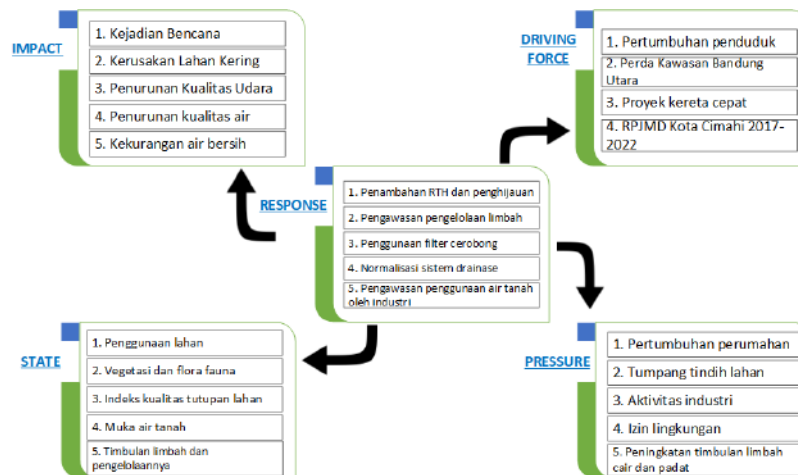
Maka DIKPLHD ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan/pengendalian isu lingkungan hidup yang terjadi dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan lingkungan sehingga dapat memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan mewujudkan salah satu misi dari Kota Cimahi.

II. ANALISIS DPSIR

2.1. Tata Guna Lahan

Kondisi penggunaan lahan di Kota Cimahi identik dengan pertumbuhan lahan perumahan atau lahan yang dipergunakan untuk kegiatan manusia

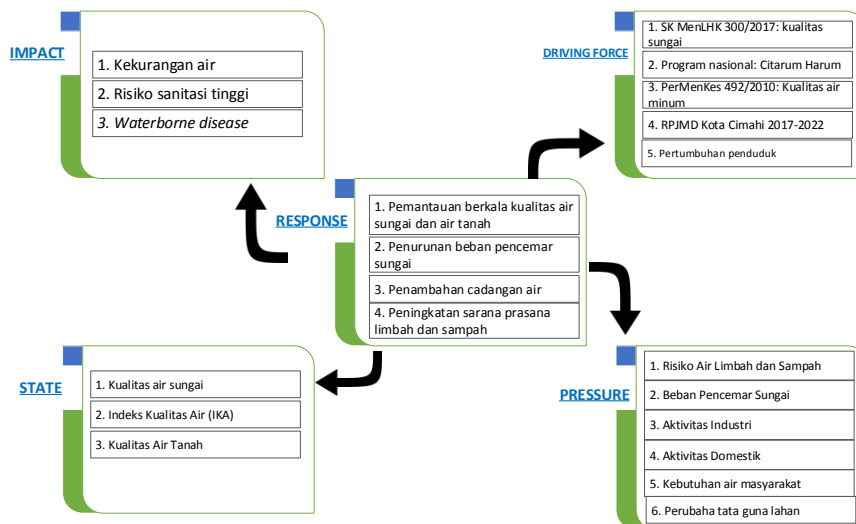
laininya, seperti industri, perdagangan, dan sebagainya. Pada tahun 2019, dari total luas Kota 4.250 Ha, 86,8% lahan di Kota Cimahi digunakan sebagai lahan non pertanian (perumahan, kawasan perdagangan, pariwisata, dan sebagainya). Sedangkan jika dilihat keberadaan vegetasi, 47% luas lahan Kota Cimahi belum ditutupi oleh vegetasi (lahan non vegetasi), sehingga kota ini memiliki Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 26,20 yang berarti masih kurangnya lahan yang tertutupi oleh vegetasi. Kondisi ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk, penetapan Kawasan Bandung Utara (KBU), proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misi kota berupa peningkatan perekonomian. Hal-hal tersebut mendorong timbulnya faktor lain seperti tekanan kebutuhan lahan perumahan, tumpang tindih lahan, aktivitas industri, peningkatan timbulan limbah, dan perizinan lingkungan.



2.2. Kualitas dan Kuantitas Air

Salah satu faktor pemicu dalam isu kualitas dan kuantitas air yang juga mempengaruhi isu lain adalah pertumbuhan penduduk. Lingkup dari analisis DPSIR isu ini ialah air sungai dan air tanah/sumur, baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk kondisi kualitas air di, terdapat empat parameter yang menjadi tolak ukur penilaian kualitas air, yaitu kualitas air sungai dan air tanah (perbandingan dengan baku mutu), status mutu air, dan indeks kualitas air. Pada tahun 2019, kualitas air sungai di Kota Cimahi (15 titik

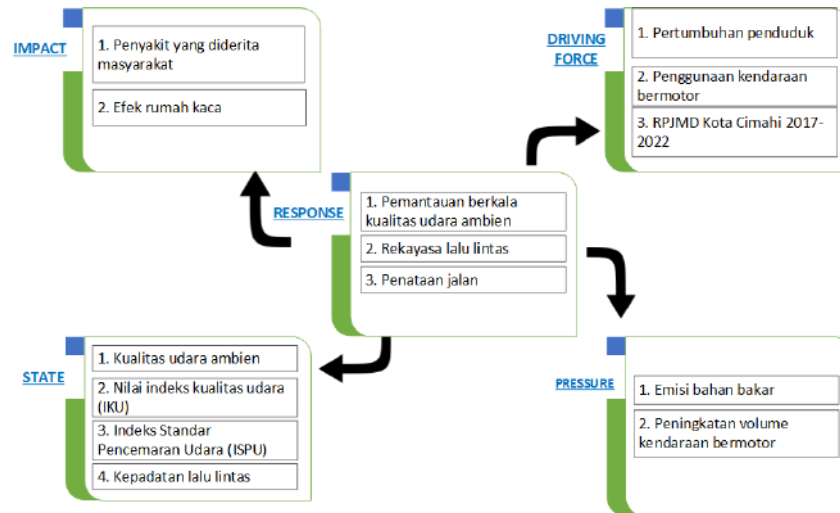
pantau) masih banyak yang melebihi baku mutu, termasuk parameter TSS, COD, DO, serta parameter uji lainnya. Selain itu, Indeks Kualitas Air (IKA) sungai Kota Cimahi pada tahun 2019 berada di skor 41,23 (skala 100) kriteria marginal yang berarti kualitas air sungai ini masih perlu dikelola lebih baik lagi. Selain itu, pengujian kualitas air tanah di beberapa lokasi menunjukkan masih banyak parameter yang melebihi baku mutu, terutama nitrat (NO₃), mangan (Mn), dan total *coliform*. Kualitas air seperti ini secara tidak langsung akan menyebabkan keterbatasan penggunaannya oleh masyarakat, sehingga terjadi kekurangan air bersih. Faktor-faktor yang turut mendorong kondisi ini yaitu pertumbuhan penduduk, misi peningkatan perekonomian, perumbuhan aktivitas industri, peningkatan jumlah timbulan limbah (cair dan padat), dan lainnya.



2.3. Kualitas Udara

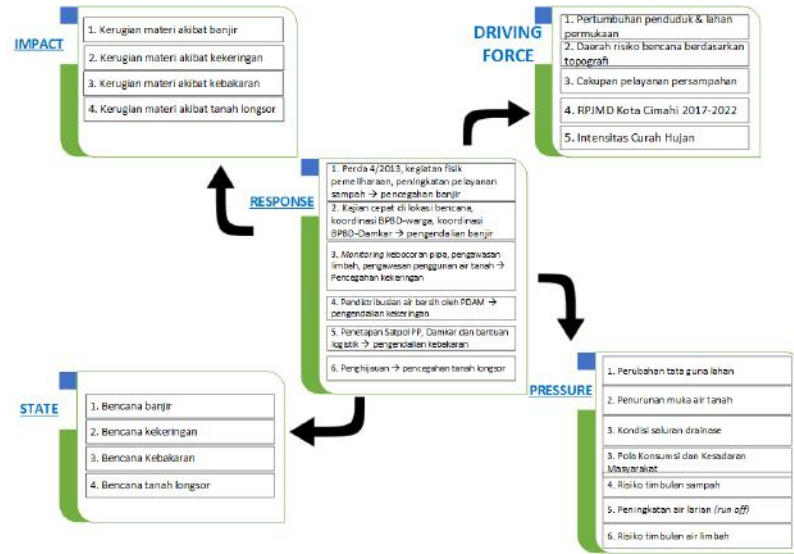
Analisis kondisi isu lingkungan ketiga, yaitu kualitas udara, digambarkan dengan konsentrasi parameter SO₂ dan NO₂ yang dibandingkan dengan baku mutu. Hasil dan *cross-check* antara hasil uji dengan baku mutu tersebut menunjukkan kualitas udara di Kota Cimahi masih di bawah baku mutu. Selain itu, jika data kualitas udara tersebut diolah menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU), hasil menunjukkan IKU Kota Cimahi sebesar 73, dengan keterangan kelas indeks "cukup" (skala indeks 100). Begitu pun

dengan ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara. Kualitas udara seperti ini didorong dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan aktivitas terutama yang menggunakan bahan bakar (memasak, berkendara, dan sebagainya), pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, ketidakseimbangan dengan lahan vegetasi, dan sebagainya. Semua faktor tersebut saling berkaitan sebagaimana tergambar dalam diagram berikut.



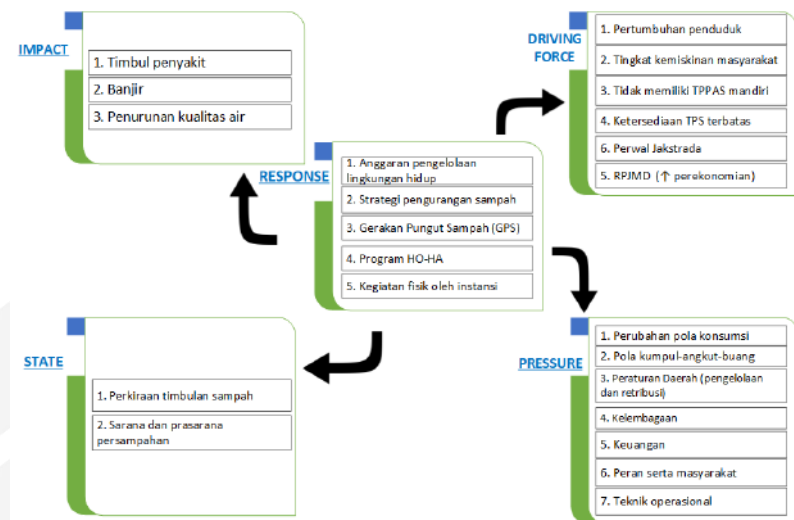
2.4. Risiko Bencana

Melalui analisis DPSIR, diketahui bahwa Kota Cimahi memiliki risiko untuk terjadinya bencana. Bencana tersebut terdiri dari banjir, kekeringan, kebakaran, dan tanah longsor. Pemicu terjadinya bencana tersebut beragam, tergantung dari bencana yang terjadi. Secara garis besar, pertumbuhan penduduk, penggunaan lahan, timbulan limbah, dan peningkatan air larian (*run off*) masih menjadi faktor pemicu dan pendorong yang paling berperan terhadap terjadinya suatu bencana. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dampak saat kejadian, tetapi dampak jangka panjang seperti kerugian materi, korban jiwa, dan sebagainya.



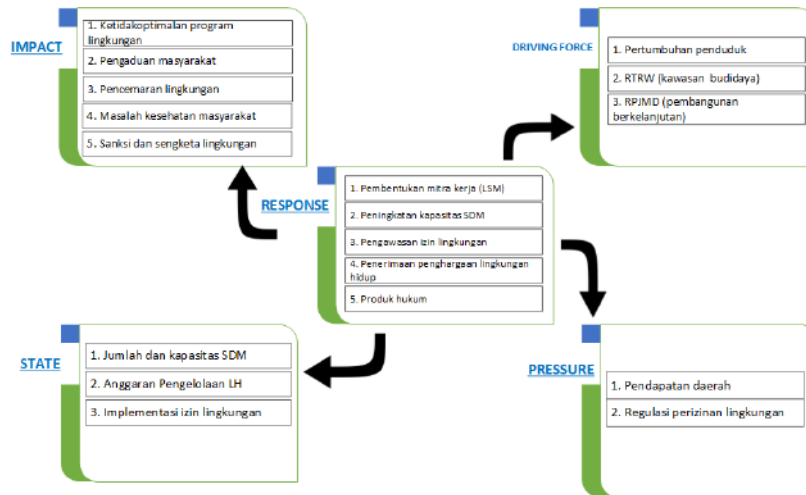
2.5. Perkotaan (Persampahan)

Pada tahun 2019, timbulan sampah Kota Cimahi mencapai 268.703 ton/hari dengan cakupan pelayanan 95%, atau sebesar 255.271 ton/hari. 63% sampah Kota Cimahi ditimbulkan dari permukiman, sedangkan sisanya berasal dari industri, pasar, rumah sakit, dan instansi. Faktor pemicu dari timbulan sampah ini jelas sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, mengingat jumlah penduduk Kota Cimahi terus meningkat di setiap tahunnya. Selain jumlah penduduk, kebijakan dan peraturan pemerintah juga tentu mempengaruhi kondisi persampahaan kota ini. Hal tersebut juga seharusnya didukung oleh kelembagaan, keuangan, peran serta masyarakat, pola konsumsi masyarakat, dan merubah pola kumpul-angkut-buang.



2.6. Tata Kelola

Sedikit berbeda dengan analisis isu-isu lingkungan sebelumnya, isu terakhir yang merupakan tata kelola ini membahas isu dalam pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan yang mencakup keuangan, kelembagaan, perizinan, dan sebagainya. Status yang menggambarkan tata kelola di Kota Cimahi tahun 2019 terdiri dari jumlah serta kapasitas SDM, anggaran pengelolaan lingkungan hidup, dan implementasi izin lingkungan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi isu terkait tata kelola ini adalah pemebntukan mitra kerja, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan izin lingkungan, penerimaan penghargaan sebagai motivasi, serta menyusun produk hukum.



III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menetapkan isu prioritas DIKPLHD Kota Cimahi tahun 2019 ini terdiri dari enam langkah utama:

Langkah 1: **studi literatur** meliputi kajian terhadap pustaka dan konsep-konsep pengelolaan lingkungan yang telah ada. Tahap ini sangat penting sebagai dasar berpijak dalam penentuan isu prioritas lingkungan di Kota Cimahi. Diantara literatur yang diacu adalah Visi Misi Kota Cimahi, DIKPLHD Kota Cimahi tahun 2019, Renstra DLH Kota Cimahi tahun 2018-2022 dan *Sustainable Development Goals*.

Langkah 2: **analisis data** dilakukan dengan metode DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Response*). Metode ini merupakan rantai hubungan sebab akibat yang dimulai dengan *driving force* atau kekuatan pendorong, melalui *pressure* atau tekanan ke *state* atau status, dan memberikan *impact* atau dampak pada manusia dan lingkungan. Pada akhirnya semua hal tersebut mengarah pada *response* atau jawaban untuk mengatasi masalah yang ada.

Langkah 3. **penetapan isu lingkungan potensial** merupakan hasil isu lingkungan dari studi literatur dan analisis DPSIR. Isu lingkungan tersebut merupakan isu yang tertuang di dalam RPPLHD Kota Cimahi, KLHS RTRW Kota Cimahi, RPJMD Kota Cimahi diperkuat dengan review literatur sebelumnya.

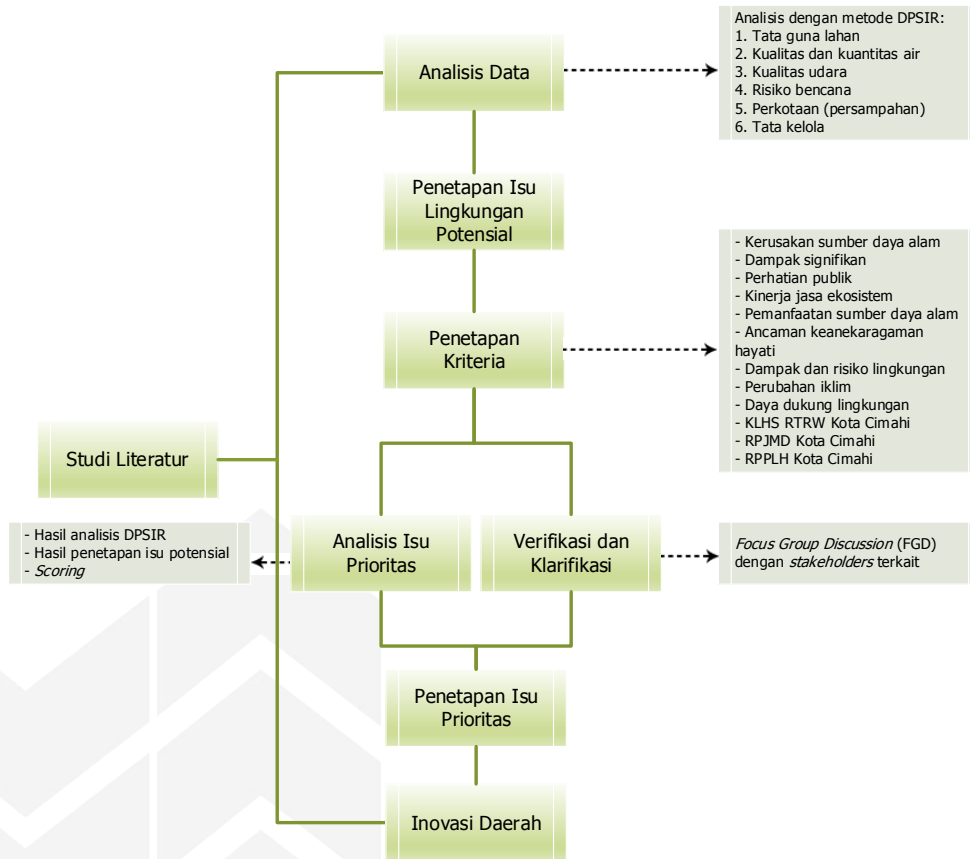
Langkah 4. **penetapan kriteria** dilakukan untuk memberikan landasan dalam langkah berikutnya, yakni penetapan isu lingkungan prioritas. Mengingat banyaknya isu lingkungan yang teridentifikasi dalam berbagai studi terkait lingkungan di Kota Cimahi, kriteria ini menjadi penting untuk membuat daftar isu lingkungan yang tidak terlalu panjang (*short listing*). Kriteria yang akan digunakan adalah sesuai dengan pedoman penyusunan Dokumen IKPLHD 2019 dari KLHK, UU Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 dan juga berdasarkan dokumen pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi, sehingga kriteria yang ditetapkan diantaranya kerusakan sumber daya alam, dampak signifikan, perhatian publik, kinerja jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, ancaman keanekaragaman hayati, dampak dan resiko lingkungan, perubahan iklim, daya dukung lingkungan, RPPLHD Kota Cimahi, KLHS RTRW Kota Cimahi, dan KLHS RPJMD Kota Cimahi.

Langkah 5. **penetapan isu prioritas** dilakukan dengan menggunakan metode *scoring*. Isu lingkungan potensial yang sudah ditetapkan kemudian dipilih lima isu dengan nilai tertinggi dengan mempertimbangkan kriteria

penetapan. Analisis isu prioritas ini akan dilanjutkan dengan verifikasi dan klarifikasi untuk penetapan akhir isu prioritas lingkungan.

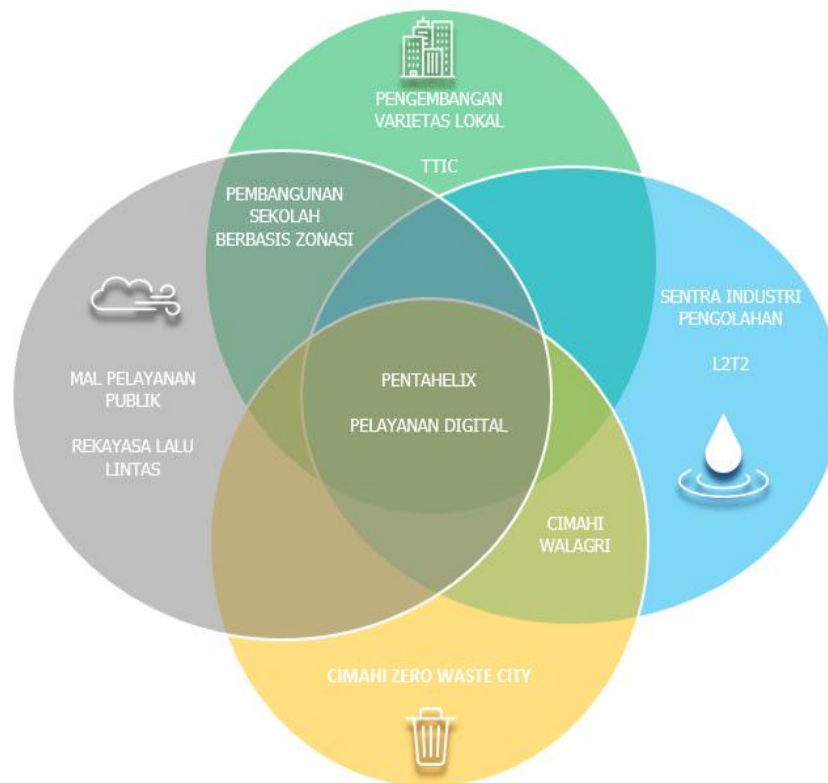
Langkah 6. **verifikasi dan klarifikasi** dilakukan untuk mengerucutkan isu lingkungan potensial yang sudah diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Hal ini diperlukan sebagai upaya mengakomodasi dan *cross-check* isu lingkungan potensial terhadap stakeholder lingkungan di Kota Cimahi. Metode yang dilakukan adalah dengan cara *Focus Group Discussion* yang kemudian dilanjutkan dengan rapat intensif dengan Tim DIKPLHD Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Dengan dilakukannya verifikasi dan klarifikasi ini, isu prioritas yang sesungguhnya sudah dapat ditetapkan.

Setelah enam tahap dilakukan untuk menetapkan isu prioritas lingkungan, hidup, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi **inovasi daerah**, yaitu jawaban dari permasalahan lingkungan. Langkah ini menjelaskan inovasi-inovasi yang telah dilakukan Kota Cimahi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada.



IV. INOVASI DAERAH

Fokus inovasi pengelolaan daerah diarahkan pada isu lingkungan prioritas yang telah dibahas pada bab 3, yaitu tata guna lahan, kualitas dan kuantitas air, persampahan, dan kualitas udara. Dalam mengatasi isu-isu tersebut, pemerintah telah melaksanakan beberapa inovasi seperti yang dapat dilihat pada diagram dan penjelasan berikut.



4.1 Mall Pelayanan Publik (MPP)

Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah , serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah terjangkau, aman dan nyaman.

4.2 Rekeyasa Lalu Lintas

a. Jaringan Trayek Perkotaan Baru

Jaringan trayek perkotaan di Kota Cimahi dilakukan untuk memberikan pelayanan jasa angkutan umum kepada masyarakat, khususnya untuk menunjang operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi yang berada di Jalan Aruman yang selama ini belum terlayani jaringan trayek perkotaan. Adanya pelayanan jasa angkutan umum diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pengunjung MPP sekaligus juga dapat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat, sehingga dapat mengurangi besaran pencemaran udara di Kota Cimahi.

b. Mudik Gratis

Mudik Gratis Lebaran Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas pengguna jalan dan mengurangi kepadatan kendaraan dan mengurangi polusi udara.

c. *Car Free Day* (Hari Bebas Kendaraan Bermotor)

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Cimahi diperlukan upaya manajemen rekeyasa lalu lintas melalui penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di sejumlah ruas jalan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas.

d. Kawasan Tertib Lalu Lintas

Sejalan dengan perkembangan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kawasan tertib lalu lintas dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan tertib lalu lintas di Kota Cimahi. Keterangan ruas jalan dan panjang ruas jalan yang diberlakukan kawasan tertib lalu lintas tercantum dalam Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 551/Kep.421-Dishub/2019 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Cimahi.

4.3 Cimahi Zero Waste City

Cimahi Zero Waste City merupakan gerakan pengurangan sampah yang telah dicanangkan di Kota Cimahi sejak tahun 2017. Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan edukasi pemilahan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan pemanfaatan sampah terpilah

yang dilakukan di permukiman warga, sekolah, maupun instansi pemerintah.

a. Siswa Bertumbler

Merupakan Program yang dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi surat edaran dan pemantauan secara langsung agar sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi mengharuskan siswa dan warga sekolah membiasakan penggunaan tempat minum dan membawa kotak makan dan jajan sendiri dari rumah, sehingga dapat mengurangi kemasan minuman dan pembungkus makanan/jajanan disekolah.

b. HO-HA

c. KTT Bank Sampah

Bank Sampah Induk Kota Cimahi bekerjasama dengan Twin Tulipware yang berada di Kota Cimahi dalam program KTT ini. Program ini adalah salah satu cara untuk melakukan pengelolaan sampah anorganik yang banyak dihasilkan di masyarakat

d. Sosialisasi Pasar Rakyat

Peserta kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pasar Rakyat berasal dari 4 Pengelola Pasar dan perwakilan dari 4 pedagang Pasar yaitu Pedagang dari Pasar Atas Baru, Pedagang dari Pasar Cimindi , Pedagang dari Pasar Melong dan Pedagang dari Pasar Citeureup.

4.4 Pentahelix

Kekuatan pembangunan suatu negara atau wilayah perlu didukung oleh semua elemen. Percepatan pembangunan tak bisa dilakukan satu pihak. Maka konsep pembangunan 'pentahelix', di mana unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha (kolaborasi *Academician, Business, Community, Government, Media* / ABCGM) kelima unsur tersebut harus kompak, saling support, untuk membangun Citarum yang harum, bersih, sehat, dan lestari dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan.

a. GNP DAS

Kegiatan GNP DAS ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam memulihkan hutan dan lahan untuk penyelamatan sumber daya air, produktivitas lahan, perubahan iklim dan pencegahan bencana hidro meteorologi.

b. Gerakan Pungut Sampah (GPS)

Kegiatan Gerakan Pungut Sampah (GPS) ini merupakan gerakan yang diinisiasi oleh sekelompok komunitas, yang merupakan gabungan Ikatan Alumni (IKA) setingkat SMA di Kota Cimahi. Target sasaran kegiatan ini adalah seluruh warga masyarakat yang berada di lokasi kegiatan. Kegiatan ini tidak hanya memunguti sampah yang berceceran di lokasi akan tetapi juga memberikan edukasi tentang pengelolaan lingkungan hidup.

c. Solar STBM

Sesuai dengan SDG's tujuan pembangunan berkelanjutan 6 yaitu menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan. Dalam PERMENKES Nomor 3 Tahun 2014, strategi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain yaitu: Penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*); Peningkatan kebutuhan sanitasi (*demand creation*); Peningkatan penyediaan akses sanitasi (*supply improvement*). Kegiatan yang dilakukan pada Program Solar STBM berlokasi di Kelurahan Cibeber pada tahun 2019 diantaranya adalah Pelatihan Wirausaha Sanitasi, Penantangan Komitmen, dan Pembentukan Tim Verifikasi.

4.5 Cimahi Walagri

a. Mantri Kamalir

Pendataan saluran yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berisi data kondisi saluran (panjang, lebar, tinggi), identitas saluran, kriteria saluran dan pendokumentasian saluran.

Permasalahan yang terjadi di saluran seperti adanya sedimentasi, sampah, crossing dan kapasitas saluran yang tidak memenuhi dilihat dari bahan saluran maupun kapasitas yang tidak sesuai dengan debit saluran. Data saluran tersebut dibuat menjadi data base yang selanjutnya akan di gabung dengan data GIS menjadi data spasial.

b. Griya Plus/Rutilahu

GRIYA artinya rumah, sedangkan **PLUS** adalah akronim dari **P**astikan **L**ayak huni, **U**payakan **S**ehat. Mewujudkan kondisi rumah masyarakat yang masuk kategori **R**umah **T**idak **L**ayak **H**uni (RUTILAHU) menjadi rumah yang tidak hanya layak huni saja tetapi dapat lebih menjadikan penghuninya sehat. Salah satu syarat hunian layak huni diantaranya adalah tersedianya sanitasi yang baik, dengan adanya sarana pengolahan air limbah domestik (septictank). Tahun 2019 Dinas Pertamanan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah memperbaiki 1600 unit rumah tidak layak huni. Dengan adanya inovasi griya plus, fasilitas sanitasi masyarakat akan membaik dan berdampak positif terhadap kualitas dan kuantitas air.

4.6 Pelayanan Digital

a. Sitarung

b. Pengembangan Modul Sistem Informasi Lingkungan

c. Tandatangan Digital

d. Cimahi *Reading Habbit*

e. Jaringan Internet Gratis

f. Open Data Statistik

g. Sistem Inovasi Daerah

4.7 Pengembangan Varietas Lokal

a. Konservasi Durian Kamarung

Konservasi Durian Lokal yang hanya tersisa 1 pohon maka dilakukan perbanyak tanaman dengan teknik okulasi. Untuk menjamin keaslian varietas durian kamarung maka dilakukan pendaftaran varietas lokal

dengan nama varietas "KAMAJAYA. Luasan yang digunakan untuk penanaman durian kamarung menjadi kawasan konservasi, menjadi response untuk isu lingkungan mengenai tata guna lahan di Kota Cimahi.

4.8 Sentra Industri Pengolahan

Kajian Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan di Kota Cimahi, merupakan hasil kerjasama Bidang Perindustrian Disdagkoperin Kota Cimahi dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) UNPAD dan bersinergi dengan Jurusan Teknik Kimia UNJANI dan POLBAN. Kajian tersebut berupaya mengidentifikasi IKM Kota Cimahi melalui analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, & Threats*) dan Bussiness Model Canvas (BMC) dalam rangka pembentukan dan pengembangan sentra industri pengolahan di Kota Cimahi, khususnya sentra IKM Tempe di Jalan Margaluyu RT 07 RW 02 Kelurahan Cimahi.

4.9 Layanan Lumpur Tinja Terjadwal

Pemakaian tangki septik sebagai tangki pengumpul lumpur tinja akan mengakibatkan munculnya timbulan lumpur tinja. Proses pengolahan tinja oleh tangki septik masih sangat terbatas dan belum sempurna sehingga beberapa parameter pencemar dan bakteri patogen masih terkandung cukup tinggi, oleh karena itu buangan lumpur tinja tersebut perlu diolah lebih lanjut, karena dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Unit Pelayanan Teknis Pengelola Air Limbah Domestik (UPT PALD) melakukan inovasi berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air dengan pelayanan penyedotan lumpur tinja terjadwal yang dilakukan secara berkala. Terhitung pada tahun 2019 ada 140 pelanggan yang rutin melakukan penyedotan tinja di UPT PALD Kota Cimahi.

4.10 Toko Tani Indonesia Center (TTIC)

Toko Tani Indonesia Center atau yang disebut TTIC adalah lembaga yang melakukan fasilitasi pengadaan pasokan pangan dalam pendistribusian dari Gapoktan/LUPM/pemasok ke konsumen/masyarakat serta sumber

informasi ketersediaan dan harga pangan. Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Kota Cimahi melaksanakan bazaar pangan murah berkualitas setiap bulan 2 kali, yaitu 1 kali pelaksanaan di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi dan 1 kali di wilayah kelurahan atau kecamatan

4.11 Pembangunan Sekolah Berbasis Zonasi

Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki disertai jumlah peserta didik yang terus bertambah dan tidak meratanya prasarana pendidikan dimiliki maka dilakukan merger untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di Kota Cimahi.

V. PENUTUP

Simpulan dari penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2020:

1. Data dan informasi mengenai kondisi lingkungan baik berupa data dasar maupun hasil analisis sebagian besar telah berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber. Pengumpulan ini dilakukan untuk memberikan informasi lingkungan di daerah Kota Cimahi dan memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk berkolaborasi dalam pengumpulan data tersebut.
2. Isu lingkungan prioritas di Kota Cimahi untuk dokumen tahun 2020 yaitu tata guna lahan, kualitas dan kuantitas air, persampahan, dan kualitas udara, dengan metode analisis yang digunakan ialah DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*) serta *Focus Group Discussion* (FGD) untuk verifikasi dan klarifikasi.
3. Tersusunnya dokumen dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan penerapan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan isu lingkungan prioritas yang dituangkan dalam suatu inovasi daerah Kota Cimahi.